

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, sejak tahun 1969 dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 1999-2007. Pada tahun 1998 menunjukkan penurunan Pertumbuhan Ekonomi yaitu -13,12%, hal ini disebabkan karena krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis multidimensi, sehingga membawa dampak pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, kemudian pada tahun-tahun berikutnya perekonomian nasional Indonesia mengalami pemulihan, meskipun jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang mengalami krisis serupa, proses pemulihan ekonomi di Indonesia sedikit lebih lambat.

Otonomi daerah merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut. Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 ayat 1, menyatakan : Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi : a) pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ; b) pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan c) pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Undang-undang tersebut mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan hal tersebut, salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan daerah adalah otonomi fiskal daerah. Otonomi fiskal (Pendapatan Asli Daerah) memberikan gambaran kemandirian atau kemampuan suatu daerah dalam berotonomi.

Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang

menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Dengan adanya otonomi, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Dengan kata lain, bahwa otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah di dalam berbagai aspek terutama aspek perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan.

Pada beberapa tahun terakhir perekonomian di Indonesia belum menunjukkan pemulihan yang berarti setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang berimbas ke daerah. Beberapa indikator ekonomi yang mendukung ekonomi tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, tingkat pengangguran dan investasi yang belum maksimal.

Dari data yang diperoleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi secara nasional meningkat sebesar 6,10 % pada tahun 2008 sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Sumatera Utara sebesar 6,39 % pada tahun 2008. Peneliti melihat suatu fenomena dalam kurun waktu 2004- 2008 yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sumatera Utara adalah salah satu propinsi yang menyumbangkan pajak dari sektor perkebunan yang terbesar di Indonesia selain Propinsi Riau tentunya. Propinsi Sumatera Utara pun dalam beberapa tahun belakangan ini telah memekarkan daerahnya menjadi beberapa kabupaten baru seperti Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Pakpak Barat, yang

menunjukkan bahwa di Sumatera Utara masih terdapat potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang masih dapat dikembangkan lagi. Beberapa daerah itu sedang berada dalam tahap pengembangan daerah, dan hal ini amat nampak dari perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai yang menunjukkan perkembangan yang paling menonjol dibandingkan dengan daerah pemekaran lainnya.

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketidakkonsistenan ini nampak dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo ini ingin melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap kemandirian daerah, serta menyimpulkan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) ini memiliki hasil yang cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2009) ingin melihat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo menggunakan dua variabel independen yaitu Belanja Pembangunan dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta satu variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan variabel intervening yaitu Kemandirian Daerah.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo ini, maka penulis melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel independen yaitu variabel DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak dan Belanja Pegawai dengan lokasi penelitian yang berbeda dan tahun penelitian yang berbeda pula. Pendapatan per kapita itu sendiri merupakan indikator kenaikan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Penulis ingin melihat pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di 15 Kabupaten dan 7 Kota di Sumatera Utara pada tahun-tahun amatan antara 2004-2008.

Fenomena yang selama ini ada di daerah adalah otonomi daerah yang berjalan belum maksimal, dari data-data yang diperoleh dari dan beberapa literatur yang ada, menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini belum berjalan secara maksimal. Beberapa rencana yang telah disusun oleh pemerintah daerah, hampir sebagian besar belum terealisasi dengan baik. Potensi-potensi yang ada selama ini juga belum sepenuhnya dapat tereksplorasi dengan baik dan benar oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten. Atas hal tersebut peneliti berusaha meneliti tentang: "Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota Se Sumatera Utara."

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu

1. Faktor-faktor PAD, DAU, DAK, DBH, Investasi Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja Modal manakah yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara?."

2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), Investasi Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Untuk menguji faktor PAD, DAU, DAK, DBH, Investasi Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja Modal yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), Investasi Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu :

1. Bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis faktor-faktor PAD, DAU, DAK, DBH, Investasi Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja Modal yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di kab/kota se Sumatera Utara.
2. Bagi Pemerintah daerah untuk menganalisis potensi daerahnya dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang terdapat di Kabupaten dan Kota yang berada di dalam Propinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Peneliti selanjutnya untuk bahan referensi penelitian terutama pada bidang penelitian yang sejenis.

1.5. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari ide penelitian yang sudah dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo pada tahun 2009 merupakan penelitian yang ingin melihat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Pembangunan terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara.
2. Variabel independen dalam penelitian terdahulu adalah PAD, Belanja Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Kemandirian Daerah. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitiannya adalah PAD, DAU, DAK, DBH, Investasi Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Sehingga dalam penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo ini mengambil populasi seluruh Kabupaten dan Kota di DIY selama periode 2000-2007 sedangkan dalam penelitian ini periode penelitiannya dilakukan antara tahun 2004-2008.
4. Penelitian terdahulu menggunakan data sensus (seluruh populasi dijadikan sampel penelitian). Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan mengambil populasi pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 dengan proporsi 22 Kabupaten dan 7 Kota. Namun di dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah 15 Kabupaten dan 7 Kota.

5. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor dan polling lease squared ini bertujuan agar hasil analisis setiap daerah diketahui faktor yang mempengaruhinya sehingga pemerintah kota/kabupaten di daerah tersebut terpacu dalam peningkatan potensi potensi di dalam pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan peneliti terdahulu menggunakan analisis regresi linier berganda.
6. Peneliti ingin menguji penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Partolo yang mengambil populasi di Jogja yang memasuki tahun 2000 peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan dengan semakin membaiknya iklim investasi dan berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong sektor riil sedangkan Propinsi Sumatera Utara merupakan propinsi yang pertumbuhan ekonominya dipengaruhi dalam berbagai sektor yang semakin sehingga peneliti ingin menguji beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan propinsi Sumatera Utara tersebut.